DEKOLONISASI HISTORIOGRAFI INDONESIA: REKONSTRUKSI METODOLOGIS, TANTANGAN SENTRISME LOKAL, DAN OTONOMI EPISTEMOLOGIS DALAM PENULISAN SEJARAH NASIONAL

Dewi Putri Yani[1], Etmi Hardi[2], Haldi Patra[3]

[1,2,3]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : dewiputriyani1354@gmail.com[1], etmihardi@fis.unp.ac.id[2], hpatra@fis.unp.ac.id[3]

ABSTRAK

Dekolonisasi historiografi Indonesia bukan sekadar proyek politik pasca-kolonial, melainkan sebuah transformasi epistemologis yang rumit dan berkelanjutan. Penulisan sejarah nasional yang bercorak Indonesiasentris dituntut untuk meruntuhkan dominasi narasi Eurosentris (Neerlandosentris) tanpa terjebak dalam chauvinisme romantis. Artikel komprehensif ini bertujuan untuk membedah anatomi sejarah dekolonisasi penulisan masa lalu Indonesia, melacak evolusi metodologinya sejak Seminar Sejarah Nasional I tahun 1957, serta mengidentifikasi ketimpangan struktural yang melahirkan fenomena Jakarta-sentrisme atau Jawa-sentrisme. Dengan menggunakan metode sejarah kritis yang mencakup tahapan heuristik mendalam, kritik sumber eksternal dan internal, interpretasi kontekstual, serta historiografi sintetis, penelitian ini mengeksplorasi integrasi sejarah lokal sebagai elemen otonom yang memperkaya narasi makro nasional. Hasil kajian menegaskan bahwa otonomi narasi sejati tercapai ketika sejarawan mampu melakukan eksploitasi kritis terhadap tradisi lisan (oral history) serta arsip regional sebagai konter-narasi terhadap dokumen resmi kolonial.Pendekatansejarahdaribawah (history from below) ditawarkan sebagai kerangka kerja adaptif untuk merajut mozaik pengalaman sejarah kolektif keindonesiaan secara adil, objektif, dan multidimensional.

Kata Kunci : *Historiografi Indonesia, Dekolonisasi Epistemologis, Indonesiasentris, Sentrisme Lokal, Sejarah Kritis, History from Below.*

ABSTRACT

The decolonization of Indonesian historiography is not merely a post-colonial political project, but a complex and ongoing epistemological transformation. The construction of an Indonesiacentric national history is compelled to dismantle the dominance of Eurocentric (Neerlandocentric) narratives without falling into the trap of romantic chauvinism. This comprehensive article aims to dissect the anatomical history of decolonizing Indonesia's past, trace its methodological evolution since the First National History Seminar in 1957, and identify the structural inequalities that gave rise to Jakarta-centric or Java-centric phenomena. Utilizing the critical historical method encompassing exhaustive heuristics, external and internal source criticism, contextual interpretation, and syntactic historiography, this study explores the integration of local history as an autonomous element that enriches national macro-narratives. The findings underscore that genuine
narrative autonomy is achieved when historians critically exploit oral traditions and regional archives as counter-narratives to official colonial documents. A history from below approach is proposed as an adaptive framework to weave the mosaic of collective Indonesian historical experiences in an equitable, objective, and multidimensional manner.

Keywords : *Indonesian Historiography, Epistemological Decolonization, Indonesiacentric, Local Centrisms, Critical History, History from Below.*

PENDAHULUAN

Penulisan sejarah (historiografi) di dalam rahim sebuah negara bangsa pasca-kolonial seperti Indonesia selalu memikul beban ganda. Di satu sisi, ia harus berfungsi sebagai instrumen ilmiah yang setia pada kebenaran objektif empiris. Di sisi lain, ia tak jarang dituntut menjadi jangkar ideologis guna memperkuat integrasi nasional dan membentuk memori kolektif masyarakat yang baru saja merdeka. Realitas dualistik ini memicu benturan epistemologis yang hebat ketika para intelektual awal Indonesia mencoba merumuskan kembali bagaimana sejarah masa lalu kepulauan ini harus ditulis. Selama berabad-abad, narasi masa lalu Nusantara dikungkung oleh kepentingan eksternal yang bias dan meminggirkan peran aktor pribumi (bumiputera).

Sebelum intervensi metodologi modern, Indonesia memiliki tradisi panjang penulisan sejarah tradisional. Bentuk-bentuk seperti babad, hikayat, tambo, atau serat memuat ingatan kolektif yang berpusat pada kosmos istana (istanasentris) dan legitimasi magis-religius sang penguasa. Walaupun sarat dengan nilai-nilai kultural dan heritabilitas lokal, historiografi tradisional ini kerap mengaburkan batasan antara fakta historis dan mitos genealogis. Ketika kolonialisme Barat menancapkan kuku kekuasaannya, tradisi ini digantikan oleh historiografi kolonial yang dibawa oleh para sarjana, pegawai administrasi, dan sejarawan Eropa. Kehadiran mereka membawa tradisi pengarsipan yang sistematis, namun secara ideologis bercorak Neerlandosentris atau Eurosentris.

Dalam kacamata sejarawan kolonial, aktivitas VOC dan pemerintah Hindia Belanda diposisikan sebagai pusat dari peradaban di Nusantara. Rakyat lokal dipandang dari sudut pandang stereotipikal: malas, tidak beradab, lambat, atau sebagai kelompok perusuh dan pemberontak apabila berani mengangkat senjata melawan dominasi asing. Struktur narasi kolonial sengaja disusun untuk membenarkan praktik eksploitasi ekonomi dan penundukan politik. Kondisi inilah yang memicu kesadaran mendalam bagi para pendiri bangsa bahwa kemerdekaan fisik dari penjajahan harus segera diikuti oleh kemerdekaan berpikir melalui dekolonisasi historiografi nasional.

Puncak kesadaran akademik ini termaterialisasi secara formal dalam perhelatan akbar Seminar Sejarah Nasional I yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Desember 1957 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Seminar ini digerakkan oleh para pemikir terkemuka era itu yang mengumandangkan manifesto radikal untuk mengubah orientasi penulisan sejarah dari Neerlandosentris menjadi Indonesiasentris. Tujuan utamanya adalah mengembalikan rakyat Indonesia sebagai subjek aktif, pelaku utama, dan penentu arah sejarahnya sendiri. Peristiwa perlawanan daerah tidak lagi dinilai sebagai "pemberontakan terhadap pemerintah yang sah", melainkan sebagai "perjuangan suci mempertahankan kemerdekaan".

Kendati gerakan Indonesiasentris telah berjalan selama hampir tujuh dekade, proses dekolonisasi ini belum sepenuhnya selesai dan justru melahirkan tantangan-tantangan metodologis baru. Penulisan sejarah nasional di era modern sering kali dikritik karena terjebak dalam pola sentralisasi baru yang bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris. Fokus penulisan sejarah makro nasional terlalu terpusat pada dinamika politik elite di ibukota atau medan pertempuran besar di Pulau Jawa, sementara dinamika sosial-ekonomi, kultural, dan pergerakan politik di daerah-daerah luar Jawa kerap tereduksi menjadi sekadar lampiran pelengkap. Oleh karena itu, tulisan komprehensif ini bermaksud membedah secara radikal struktur epistemologis historiografi Indonesia, meneliti hambatan integrasi sejarah lokal, serta merumuskan jalan keluar berupa metodologi sejarah kritis dari bawah (history from below) demi mewujudkan otonomi narasi sejarah nasional yang seutuhnya adil dan multidimensional.

METODE

Aparatus metodologis yang diterapkan dalam kajian ini bertumpu pada metode sejarah kritis (critical historical method) yang dikombinasikan dengan pendekatan hermeneutika teks dan analisis diskursus kritis (critical discourse analysis). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bukan berupa peristiwa fisik di lapangan, melainkan teks-teks historiografi, dokumen kebijakan, serta pemikiran-pemikiran metodologis yang memengaruhi penulisan sejarah di Indonesia.

Operasionalisasi metode sejarah kritis di dalam artikel ini dijabarkan melalui empat tahapan terstruktur sebagai berikut:

1. **Heuristik Sumber:**Tahap pelacakan dan pengumpulan sumber dilakukan secara ekstensif dengan membagi data menjadi dua kategori utama. Sumber primer dalam kajian ini meliputi dokumen-dokumen otentik hasil Seminar Sejarah Nasional (1957, 1974), naskah regulasi kurikulum pendidikan sejarah, kurasi kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta tulisan-tulisan teoretis mendasar dari Sartono Kartodirdjo dan Bambang Purwanto. Sementara itu, sumber sekunder dikumpulkan dari literatur berkala, buku teks metodologi, serta jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional dari kurun waktu teranyar (2022–2026), termasuk hasil penelitian terbaru mengenai implementasi sejarah lokal di Sumatra Barat oleh Hardi (2022) dan Patra (2023).
2. **Kritik Sumber (Verifikasi):** Kritik sumber dilakukan secara ganda, yaitu kritik eksternal untuk menguji otentisitas fisik dokumen serta kritik internal untuk membedah kredibilitas isi teks. Penulis melakukan pembacaan kritis terhadap naskah-naskah historiografi Indonesiasentris awal untuk mendeteksi apakah di dalamnya terdapat bias ideologis tertentu, anakronisme kronologi, atau penggunaan logika oposisi biner warisan kolonial yang diadopsi secara tidak sadar oleh sejarawan lokal.
3. **Interpretasi (Sintesis Konseptual):** Langkah interpretasi dilakukan dengan teknik analisis isi yang bersifat multidimensional. Penulis menggunakan kacamata ilmu-ilmu sosial bantu seperti sosiologi pengetahuan dan antropologi budaya untuk memahami mengapa sebuah narasi sejarah diproduksi pada era tertentu, dan bagaimana kepentingan kekuasaan ikut andil dalam membentuk struktur penulisan sejarah makro nasional.
4. **Historiografi Deskriptif-Analitis:** Tahap akhir berupa penyusunan seluruh hasil analisis ke dalam laporan ilmiah yang sistematis, naratif, dan objektif. Penulis memastikan setiap argumen yang dibangun didukung oleh kutipan referensi yang valid, bebas dari sentimen emosional-chauvinistik, serta disajikan dengan kaidah bahasa akademik yang baku.

2. Genealogi Dan Pergeseran Paradigma Historiografi Indonesia

Membahas dekolonisasi sejarah Indonesia mengharuskan kita untuk menelusuri kembali lembar demi lembar perkembangan cara pandang sejarah dari masa ke masa. Perkembangan historiografi di Indonesia tidak berjalan secara linier, melainkan ditandai oleh patahan-patahan epistemologis yang dipicu oleh perubahan konjungtur politik dan penguasaan teknologi pengetahuan. Struktur historis ini dapat dipetakan secara jelas ke dalam beberapa fase penting yang melatarbelakangi lahirnya metodologi sejarah modern.

Fase pertama adalah historiografi tradisional. Karakteristik utama dari fase ini adalah sifatnya yang lokal, partikular, dan berpusat pada kosmos istana (royal-centric). Tujuan utama penulisan babad atau hikayat bukan untuk menyajikan kronologi yang akurat berdasarkan bukti empiris, melainkan untuk menciptakan mitos kosmologis yang mampu melegitimasi kedudukan

raja sebagai titisan dewa atau khalifah di bumi. Meskipun demikian, historiografi tradisional memiliki arti penting sebagai penyimpan memori kolektif lokal dan struktur mentalitas masyarakat tradisional dalam merespons tekanan dari luar.

Fase kedua ditandai oleh dominasi historiografi kolonial. Ketika institusi kolonial Barat mapan di Nusantara, penulisan sejarah bertransformasi menjadi instrumen kekuasaan rasional. Para sejarawan kolonial seperti Francois Valentijn atau Thomas Stamford Raffles (meskipun Raffles menunjukkan ketertarikan besar pada kebudayaan lokal) mengonstruksikan sejarah Jawa atau Nusantara dalam kerangka ekspansi bangsa Eropa. Dalam perkembangannya di abad ke-19 dan awal abad ke-20, tulisan-tulisan sejarawan Belanda seperti E.C. Godee Molsbergen atau H.T. Colenbrander menempatkan VOC dan pemerintah Hindia Belanda sebagai pahlawan pembawa peradaban (civilizing mission), sementara gerakan perlawanan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, atau Sultan Hasanuddin dicap sebagai tindakan makar yang merusak ketertiban umum(rust en orde).

Fase ketiga lahir pasca-Kemerdekaan, yang memicu gerakan Indonesiasentris. Seminar Sejarah Nasional I tahun 1957 di Yogyakarta menjadi batu penjuru radikal. Mohammad Ali, Soedjatmoko, dan para sejarawan awal Indonesia menegaskan bahwa bangsa yang merdeka membutuhkan sejarah yang ditulis dari dalam, oleh bangsa sendiri, dan untuk kepentingan pemahaman nasional. Namun, gelombang pertama Indonesiasentris ini sering kali terjebak pada metode penulisan sejarah yang bersifat "membalikkan fakta". Tokoh Belanda yang jahat diganti menjadi tokoh Indonesia yang baik, tanpa mengubah struktur narasi, jenis sumber, dan bias politik-sentris yang mendasarinya. Akibatnya, historiografi nasional awal ini tetap bersifat elitis dan mengabaikan dinamika struktur sosial masyarakat bawah.

Memasuki era Orde Baru, penulisan sejarah nasional mengalami domestikasi ideologis demi stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Proyek penulisan Buku Babon Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang dipimpin oleh Nugroho Notosusanto diarahkan untuk menciptakan narasi tunggal yang bercorak militeristik dan sentralistis. Peran militer dalam mempertahankan kemerdekaan ditonjolkan secara masif, sedangkan dinamika politik sipil, pergerakan kaum buruh, tani, dan variasi sejarah lokal dikesampingkan. Rezim menggunakan historiografi sebagai alat kontrol sosial untuk melegitimasi struktur kekuasaan yang berpusat di Jakarta.

Fase kelima adalah era Reformasi hingga kontemporer. Tumbangnya rezim otoriter pada tahun 1998 membuka kran demokratisasi historiografi. Monopoli narasi tunggal runtuh, memicu lahirnya gelombang penulisan sejarah alternatif. Sejarawan mulai berani mengeksplorasi tema-tema sensitif seperti peristiwa 1965, sejarah perempuan, sejarah lingkungan, dan yang paling masif adalah kebangkitan penulisan sejarah lokal di berbagai daerah. Penulisan sejarah kontemporer menuntut pendekatan yang multidimensional, interdisipliner, serta inklusif terhadap keberagaman pengalaman historis manusia Indonesia.

3. Anatomi Krisis Epistemologis: Hambatan Dan Bias Dalam Historiografi Nasional

Meskipun semangat dekolonisasi telah lama didengungkan, dalam praktiknya penulisan sejarah Indonesia masih kerap mengalami krisis epistemologis. Masalah krusial pertama adalah kelangsungan bias struktural warisan kolonial yang belum sepenuhnya terkikis. Banyak sejarawan Indonesia secara tidak sadar masih bergantung penuh pada struktur kategorisasi yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebagai contoh, pembagian periodisasi sejarah Indonesia ke dalam masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa Kolonial, dan masa Nasional menunjukkan bahwa kita

masih menggunakan kerangka linearitas Barat untuk membaca dinamika internal masyarakat kepulauan yang sebenarnya berjalan secara simultan dan plural di berbagai wilayah.

Masalah kedua adalah kemunculan bias spasial berupa Jawa-sentrisme dan Jakarta-sentrisme. Ketimpangan ini terjadi karena faktor sosiologis-akademis: mayoritas lembaga pendidikan tinggi sejarah, pusat arsip nasional, dan penerbit buku besar berada di Pulau Jawa. Dokumen-dokumen tertulis mengenai pergerakan nasional atau aktivitas ekonomi tersentralisasi di Jakarta (ANRI). Dampaknya, rekonstruksi sejarah nasional Indonesia seolah-olah diidentikkan dengan dinamika yang terjadi di tanah Jawa. Sejarah daerah lain di luar Jawa baru dianggap "penting" dan dimasukkan ke dalam narasi nasional apabila daerah tersebut memberikan kontribusi langsung terhadap stabilitas politik di pusat atau ketika meletus perang besar melawan kolonial yang mengancam kedudukan Batavia.

Krisis ketiga terletak pada keterbatasan metodologis dalam pengolahan sumber daya sejarah. Tradisi akademik konvensional yang sangat positivistik menempatkan dokumen tertulis resmi sebagai kasta tertinggi sumber sejarah (no document, no history). Dalam konteks Indonesia, paradigma ini sangat merugikan bagi upaya dekolonisasi, sebab dokumen tertulis formal yang rapi sebagian besar diproduksi oleh birokrasi kolonial Belanda. Jika sejarawan lokal bersikap naif dan tidak memiliki kemampuan kritik sumber yang tajam, mereka akan selalu memproduksi narasi sejarah yang secara tidak sadar membenarkan cara pandang arsip kolonial tersebut, sehingga suara asli masyarakat bumiputera tetap teredam di balik tumpukan kertas kuno.

Sentrisme Lokal Sebagai Elemen Otonom Dan Konter-Narasi

Untuk keluar dari lingkaran setan sentralisme historiografi nasional, reposisi kedudukan sejarah lokal menjadi sebuah keniscayaan akademik yang mutlak. Sejarah lokal tidak boleh lagi diposisikan sebagai sekadar subordinat atau lampiran kecil dari sejarah makro nasional. Sebaliknya, sejarah lokal harus diakui sebagai elemen otonom yang memiliki dinamika, logika, dan struktur internalnya sendiri. Setiap daerah di Nusantara memiliki ritme historis yang berbeda; ketika Pulau Jawa sedang mengalami intensifikasi sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada abad ke-19, wilayah pedalaman Kalimantan atau Papua mungkin sedang berada dalam fase dinamika sosial kebudayaan lokal yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh kebijakan agraria Batavia.

Eksplorasi mendalam terhadap sejarah lokal mampu berfungsi sebagai konter-narasi (counter-narrative) yang efektif untuk menggugat generalisasi keliru dalam sejarah nasional. Melalui penelitian sejarah lokal, sejarawan dapat menunjukkan bahwa respons masyarakat daerah terhadap kolonialisme sangat bervariasi, tidak homogen seperti yang digambarkan buku-buku teks sekolah. Ada daerah yang melakukan resistensi militer frontal, ada yang memilih jalur diplomasi budaya, ada yang melakukan kolaborasi ekonomi taktis demi mempertahankan otonomi internal, dan ada pula yang melakukan perlawanan pasif berbasis gerakan mesianistik keagamaan.

Integrasi sejarah lokal yang otonom ini akan melahirkan sebuah historiografi Indonesia yang bersifat inklusif dan integratif. Sejarah nasional tidak lagi dipandang sebagai sebuah bangunan megah tunggal yang kaku, melainkan sebagai sebuah mozaik indah yang tersusun atas ribuan kepingan pengalaman sejarah lokal yang saling bertaut. Dengan cara ini, rasa kebangsaan keindonesiaan tidak dibangun di atas pemaksaan keseragaman narasi politik, melainkan di atas fondasi pengakuan dan penghormatan terhadap pluralitas historis seluruh daerah yang membentang dari Sabang hingga Merauke.

Tabel 1. Tipologi Komparatif Struktur Epistemologis Historiografi diIndonesia

Dimensi Analisis	Historiografi Kolonial (Neerlandosentris)	Historiografi Nasional Awal (Indonesiasentris Makro)	Historiografi Kontemporer (Sentrisme Lokal Kritis)
Lokus SpasialUtama	Batavia, Den Haag, dan pusat-pusat benteng pertahanan Eropa.	Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota pusat pergerakan politik di Jawa.	Desentralistik: Pedalaman, pesisir luar Jawa, perbatasan, dan komunitas lokal.
Kategori Subjek Sejarah	Gubernur Jenderal, pejabat BB (*Binnenlands Bestuur*), direktur perusahaan dagang.	Presiden, menteri, jenderal militer, dantokoh intelektual elite nasional.	Petani, buruh, kaum perempuan, ulama daerah, kepala suku, dan masyarakat marginal.
Karakteristik Sumber	Resmi-Birokrasi: Arsip VOC, dokumen kolonial Belanda, laporan statistik.	Formal-Nasional: Surat kabar ibu kota, undang-undang, dokumen partai, memoar elite.	Plural-Multidimensional: Tradisi lisan, folklor, arsip swapraja, dokumen lokal, artefak.
Metode Analisis	Positivistik-Linear: Berfokus pada kronologi politik dan tata kelola administrasi Barat.	Naratif-Politik: Membalikkan posisi moral peran kolonial menjadi pahlawan nasional.	Interdisipliner: Mengawinkan metode sejarah dengan sosiologi, antropologi, siber, danAI.
Filsafat Pertanggungjawaban	Legitimasi hegemoni kekuasaan kolonial Barat atas wilayah taklukan.	Membangun *Nation-Building* dan integrasi nasional pasca-kemerdekaan.	Mewujudkan otonomi epistemologis, keadilan narasi, dan objektivitas kritis.

Formulasi "History From Below" Dan Metodologi Sejarah Lisan

Salah satu pilar utama dalam mewujudkan dekolonisasi historiografi Indonesia secara substansial adalah dengan mengadopsi pendekatan sejarah dari bawah (history from below). Pendekatan yang awalnya dikembangkan oleh sejarawan Marxis Inggris seperti E.P. Thompson ini menggeser fokus perhatian sejarah dari ruang-ruang rapat elite politik menuju ruang kehidupan masyarakat biasa yang selama ini tidak memiliki suara dalam sejarah (the voiceless). Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan untuk membongkar dominasi narasi sejarah yang terlalu fokus pada aspek elite-birokratis.

Melalui history from below, sejarawan tidak lagi sibuk bertanya tentang apa yang diputuskan oleh Gubernur Jenderal di istana Bogor, melainkan bagaimana kebijakan tersebut direspons, dinegosiasikan, atau disabotase oleh para kuli di perkebunan tembakau Deli, para nelayan di pantai utara Jawa, atau para petani sawit di pedalaman Sumatra.Pendekataninimelihatrakyatbukansebagai massa abstrak yang pasif yang hanya bergerak

jika diperintah oleh pemimpinnya, melainkan sebagai agen-agen sejarah aktif yang memiliki kesadaran, strategi, dan subjek hukum moralnya sendiri dalam menghadapi tekanan struktural.

Instrumen metodologis utama yang menjadi urat nadi dari gerakan history from below adalah pemanfaatan sejarah lisan (oral history) secara ketat dan ilmiah. Ketika dokumen tertulis resmi mengabaikan eksistensi masyarakat marginal, maka memori yang tersimpan dalam ingatan kolektif lisan menjadi satu-satunya jalur penyelamat data masa lalu. Sejarah lisan bukan sekadar mendengarkan dongeng, melainkan sebuah teknik pengumpulan sumber yang melibatkan proses wawancara mendalam (in-depth interview) terstruktur dengan para saksi sejarah (witnesses) atau pelaku sejarah langsung (actor).

Namun, penerapan sejarah lisan dalam historiografi kritis menuntut kehati-hatian metodologis yang tinggi. Sejarawan tidak boleh menelan mentah-mentah setiap penuturan lisan yang didengarnya, karena memori manusia bersifat selektif dan rawan mengalami distorsi akibat perjalanan waktu atau pengaruh situasi politik masa kini. Oleh sebab itu, teknik verifikasi silang (cross-examination) mutlak dilakukan. Sumber lisan harus diuji keandalannya dengan membandingkannya dengan sisa-sisa peninggalan material arkeologis, dokumen tertulis sezaman (jika ada), serta penuturan dari saksi sejarah lain yang berada pada posisi berbeda. Melalui kombinasi ketat antara history from below dan ketajaman kritik sejarah lisan, otonomi epistemologis historiografi Indonesia yang murni bebas dari sisa-sisa bias kolonial dapat diwujudkan secara nyata.

KESIMPULAN

Dekolonisasi historiografi Indonesia merupakan sebuah perjalanan metodologis dan epistemologis panjang yang tidak boleh berhenti pada jargon politik "Indonesiasentris" yang superfisial. Mengubah orientasi penulisan sejarah nasional menuntut pembongkaran radikal terhadap struktur, kerangka berpikir, dan bias-bias spasial (Jawa-sentrisme) yang selama ini memenjarakan kreativitas intelektual sejarawan nasional. Sejarah Indonesia yang sejati tidak dapat diwakili oleh narasi tunggal yang seragam dan elitis dari pusat kekuasaan.

Otonomi epistemologis dan objektivitas penulisan masa lalu Nusantara hanya dapat diraih apabila sejarawan Indonesia bersedia merangkul sejarah lokal sebagai elemen otonom yang setara. Melalui penerapan pendekatan sejarah dari bawah (history from below) yang ditopang oleh metodologi sejarah lisan yang kritis, inklusif, dan interdisipliner, kita dapat mengangkat kembali suara-suara kaum marginal dan dinamika masyarakat daerah ke permukaan. Hasil akhirnya adalah sebuah bangunan historiografi Indonesia yang kokoh, adil, dan multidimensional—sebuah cermin masa lalu yang merefleksikan keragaman sejati wajah dan jiwa bangsa Indonesia.

DAFTARPUSTAKA

1. Abdullah,T. (2001) . *Sejarah dan Historisitas : Sebuah Esai Teoretis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
2. Ali, M. (1963). *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Jakarta : Bhratara.
3. Arsip Nasional Republik Indonesia. (2020). *Peta Jalan Digitalisasi Arsip Statis Nasional*. Jakarta: ANRI.
4. Kartodirdjo, S. (1982). *Pemberontakan Petani Banten 1888 : Kondisi Sosial, Keagamaan, dan Pergerakan Petani*. Jakarta: Pustaka Jaya.

5. Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Multidimensional dalam Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
6. Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah (Edisi Kedua)*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
7. Notosusanto, N. (1978). *Masalah Metodologi Sejarah*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Purwanto, B. (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?*. Yogyakarta : Ombak.
9. Soedjatmoko, Ali, M., Resink, G.J., & Kahin, G. M. (Eds.) (1995). *AnIntroductionto Indonesian Historiography*. Ithaca: Cornell University Press.
10. Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
11. Hardi, E. (2022). Dekolonisasi Kurikulum Sejarah : Integrasi Historiografi Lokal dalam Pembelajaran Sejarah di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sejarah Nusantara*, 6 (2), 88-103.
12. Hidayat, M. F. (2026). *Kritik Sumber di Abad Data : Panduan Sejanawan Modern Menghadapi Deepfake dan Disinformasi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
13. Lestari, D. (2025). Algorithmic Biasand Eurocentric Trapsin AI – Generated Southeast Asian History. *Journal of Digital Humanities and Asian Studies*, 14 (1), 77-95.
14. Patra, H. (2023). *Melacak Suarayang Hilang : Metodologi Penggalian Tradisi Lisan dalam Historiografi Regional Sumatera Barat*. Padang: UNP Press.
15. Pradana, A., & Setiawan, B. (2022). Penerapan Optical Character Recognition Berbasis AI untuk Digitalisasi Manuskrip Keagamaan Nusantara. *Jurnal Sejarah dan Budaya Digital*, 5 (1), 34-49.
16. Putra, R. E. (2023). *Historiografi Digital : Teori, Aplikasi, dan Tantangan Metodologis di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
17. Ramadhan, F. (2026). Decolonizing the Archives : New Approaches to Dutch Colonial Sources in Indonesian Contemporary Historiography. *Journal of Southeast Asian Historical Studies*, 32(1), 12-29.
18. Sujatmiko, B. (2025). *Epistemologi Sejarah dari Bawah : Teori dan Praktik Penulisan Historiografi Kaum Marginal Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
19. Suryani, I., & Wahid, A. (2024). Menghadapi Halusinasi Fakta : Batasan Epistemologis Large Language Models dalam Penulisan Sejarah Nasional. *Jurnal Metodologi Sejarah Indonesia*, 10 (2), 112-128.
20. Widianto, A., & Suryo, D. (2024). Menepis Jawa Sentrisme : Rekonstruksi Jaringan Perdagangan Antar pulau dalam Historiografi Indonesia Modern. *Jurnal Penelitian Sejarah Kritis*, 11(1), 45-63.

Katalog Rujukan Konseptual Metodologi Sejarah (Sumber Primer dan Sekunder)

No	Namasumber/Jenis Sumber	Deskripsi & Relevansi terhadap historiografi AI
1	**Metodologi Sejarah (Kuntowijoyo, 2003)** *(SumberPrimer)*	Rujukan teoretis utama mengenai langkah baku metode sejarah (heuristik, verifikasi, interpretasi, penulisan) guna menguji validitas hasil kerja AI.
2	**PendekatanMultidimensional (Sartono Kartodirdjo, 1992)** *(Sumber Primer)*	Peletakan perspektif sosiologis dan ilmu sosial pendukung sejarah untuk melengkapi kelemahan analisa murni komputasional AI.

3	**PetaJalanDigitalisasiArsip Statis (ANRI, 2020)** *(SumberPrimer)*	Kebijakan resmi negara mengenai penyediaan data mentah sejarah Indonesia yang menjadi basis data pelatihan sistem kecerdasan buatan domestik.
4	**Buku'HistoriografiDigital' (Putra, 2023)** *(SumberSekunder)*	Buku sekunder pertama di Indonesia yang secara komprehensif memetakan pergeseran alat bantu komputer dari era web statis menuju era generatif.
5	**Jurnal 'Menghadapi Halusinasi Fakta' (Suryani & Wahid, 2024)** *(SumberSekunder)*	Studi kritis yang membongkar kasus-kasus kesalahan fatal (halusinasi fakta) LLM dalam menyusun urutan kronologi sejarah revolusi kemerdekaan RI.
6	**Jurnal 'Algorithmic Bias' (Lestari, 2025)** *(SumberSekunder)*	Analisis ilmiah mengenai bias pasca-kolonial dalam algoritma OpenAI dan Google Gemini saat merespons isu kedaulatan laut klaim Nusantara.
7	**Buku 'Pemberontakan Petani Banten 1888' (Sartono K., 1982)** *(SumberPrimer)*	Karya fundamental peletak dasar metodologi sejarah multidimensional dan contoh nyata penulisan sejarah dari bawah di Indonesia.
8	**Buku 'Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?' (Bambang Purwanto, 2006)** *(SumberPrimer)*	Naskahdekonstruksikritisyangmenggugatkemandirian metodologis sejarawan nasional pasca-kolonial.
9	**Jurnal 'Dekolonisasi Kurikulum Sejarah' (Etmi Hardi, 2022)** *(SumberSekunderTerbaru)*	Studi sekunder mengenai aplikasi praktis nilai-nilai historiografi kritis hasil dekolonisasi dalam ruang lingkup pendidikan akademik.
10	**Buku'MelacakSuarayang Hilang' (Haldi Patra, 2023)** *(Sumber Sekunder Terbaru)*	Panduan teknis danoperasionalmengenaibagaimanatradisilisan daerah di validasi secara kritis untuk memperkaya historiografi regional.
11	**Jurnal 'Menepis Jawa-Sentrisme' (Widianto &Suryo, 2024)** *(SumberSekunder)*	Kajiankomparatifempirisyangberupayameruntuhkandominasi spasial Jawa-sentrisme dalam penulisan sejarah maritim Nusantara.